

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Andrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government*. Malang: Bayumedia Publising.
- Ardana, S. A. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asis, M. G. (2006). *Reducing Corruption at the Local Level*. Washington: World Bank Insitute.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Peneliti Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krina, L. L. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Kedepan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2018). *pengukuran kinerja sektor publik*. yogyakarta: BPFE.
- Mangkunegara, A. P. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rai, I. G. (2011). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Grafindo.
- Ratminto. (2006). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Santoso, S. (2012). *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Mnausia dan Produktivitas Kerja* . Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sumber Jurnal :

- Afryansyah, R. D. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi Di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 3, 1-11*.
- Ait Novantiani, R. W. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*.
- Albugis F, F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulagi Manado*.
- Amril, V. N. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Akuntansi*.
- Arifani, C. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 68-82.
- Detasya Rigian, R. P. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Erlanda, R. K. (2016). pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi

- Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se- Sumatera). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Fanny Jitmau, L. K. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*.
- Fernandes, W. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Hari Eka Setiyawan, M. S. (2016). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*.
- Hermin Arifianti, P. d. (2013). Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indoneisa). *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*.
- Lucy Auditya, H. L. (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 21-41.
- Made Budi Sastra Wiguna, G. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA*.
- Mappanyukki, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Internasional Ilmu Sosial Asia*, 721-729.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei*.
- Mbon, F. E. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*.

- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 149-162.
- Nur Rodiya, A. R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Pratolo, S. (2018). Effect Of Accountability And Transparency On Government Performance With Value For Money Method Through The Information. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 833-843.
- Putri, R. R. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Shinta Turalaki, J. J. (2013). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Publik Terhadap Kinerja Pelayanan (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Victorinus Laoli, S. M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Riset & Jurnal Akuntansi*.

Sumber Website :

- Febrinastri, F. 2019. *Jawa Barat Meraih Predikat Provinsi Informatif*. Diambil kembali dari suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/11/23/195557/jawa-barat-meraih-predikat-provinsi-informatif>. (2019, November 23)
- PPID Provinsi Jawa Barat. 2019. *LKIP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018*. <http://ppid.jabarprov.go.id/download/read/2330-LKIP-Provinsi-Jawa-Barat-Tahun-2018>. (2019, Maret 29)
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2019. *SAKIP Award 2018, JABAR Kembali Raih Predikat "A"*. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/31619/2019/01/28/Sakip-Award-2018-Jabar-Kembali-Raih-Predikat-A>. . (2019, Januari 28)

Regulasi:

Kementerian Dalam Negeri. 2012. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2010. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2012. *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pemerintah Pusat. 1999. *Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Pemerintah Pusat. 2008. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.*

Pemerintah Pusat. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Pusat. 2014. *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*